

NILAI KINERJA ANGGARAN SEBAGAI TOLAK UKUR PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MANADO

Aditya Martha Nugrahanto

Balai Diklat Keagamaan Manado

Jl. Aa Maramis Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado

Adityahunt46@gmail.com

Abstrak

NKA atau Nilai kinerja anggaran sebagai instrumen penting dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja sangat diperlukan untuk menilai kualitas perencanaan dan penggunaan APBN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja anggaran satuan kerja (satker) Balai Diklat Keagamaan Manado sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Agama pada Tahun Anggaran 2023. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan nilai kinerja anggaran satker Balai Diklat Keagamaan Manado Tahun 2023 diperoleh nilai kinerja anggaran sebesar 90,03 yang berasal dari nilai monev EKA sebesar 87,69 dan nilai monev IKPA sebesar 93,54. Nilai tersebut masih belum optimal karena masih ada beberapa komponen indikator yang belum mencapai nilai maksimal. Optimalisasi nilai kinerja anggaran dapat dilakukan dengan perbaikan perencanaan, peningkatan pengelolaan UP dan TUP, percepatan pengadaan belanja modal, serta yang paling utama adalah pengendalian capaian output agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : *evaluasi, kinerja, anggaran, EKA, IKPA*

Abstract

NKA or Evaluation of budget performance values as an important instrument in measuring the level of success in implementing work unit budgets is very necessary to assess the quality of planning and use of the APBN. This research aims to analyze the budget performance of the Manado Religious Education and Training Center as one of the vertical agencies of the Ministry of Religion in the budget year 2030. Based on the results of the evaluation of the Manado Religious Education and Training Center's budget performance value for 2023, a budget performance value was 90.03 which came from an EKA value of 87.69 and an IKPA value of 93.54. This value is still not optimal because there are still several indicator components that have not reached the maximum value. Optimizing budget performance values can be done by improving planning, improving UP and TUP management, accelerating capital expenditure procurement, and most importantly controlling output achievements so that they can achieve goal targets.

Keywords : *evaluation, performance, budget, EKA, IKPA*

Pendahuluan

Sebagai salah satu unit kerja Eselon 1 pada Kementerian Agama dalam bidang tugas pendidikan dan pelatihan (diklat) di Bidang Keagamaan serta melakukan penelitian dan pengembangan, Badan Litbang dan Diklat dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. Balai Diklat Keagamaan (BDK) Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis di Daerah yang melaksanakan kegiatan dalam mencapai program kediklatan Badan Litbang dan Diklat.

Yuswanto (2014) dalam tulisannya menyebutkan bahwa keuangan negara dalam arti luas meliputi keuangan Negara pada Perjan, Perum, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan dalam arti konteks yang lebih sempit, keuangan negara meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban atas badan hukum negara yang berwenang dalam mengurus hal tersebut.

Pendapat lain menyebutkan, hak dan kewajiban negara yang bernilai uang termasuk didalamnya aset milik negara (BMN) merupakan pengertian keuangan negara dalam arti luas. Sedangkan dalam konteks lebih sempit berarti hak serta kewajiban yang bernilai uang termasuk didalamnya aset milik negara pada tahun anggaran berjalan (Tjandra, 2009).

Dalam siaran pers Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa sepanjang Tahun 2023 kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga sehat dan kuat. Dalam ketidakpastian global yang terjadi selama Tahun 2023, APBN mampu menjadi (*shock absorber*) atas masalah yang mempengaruhi kesejahteraan seluruh masyarakat. Perubahan iklim, konflik geopolitik dan gejolak ekonomi serta masalah – masalah lainnya menyebabkan dampak yang kurang baik terhadap pertumbuhan ekonomi dunia yang juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan dalam pidatonya menyebutkan bahwa optimalisasi pengelolaan APBN merupakan tantangan bagi satuan kerja. Peran penting lain APBN yang turut berpengaruh pada kondisi ekonomi adalah bagaimana menjaga stabilitas harga sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Capaian atas kinerja keuangan pada Tahun 2023 tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak mulai dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang melakukan pengelolaan kas negara yang memastikan ketersediaan anggaran serta penyaluran belanja negara demi keberlangsungan pelaksanaan program pembangunan. Peran KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* juga sangat berpengaruh dalam pengelolaan keuangan APBN satuan kerja serta pertumbuhan ekonomi di daerah.

Proses dalam mengukur, menilai dan menganalisa kinerja anggaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya sehingga didapat rekomendasi untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan

anggaran merupakan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan satuan kerja. Evaluasi kinerja anggaran bagi satuan kerja merupakan salah satu alat bantu yang menjaga fungsi akuntabilitas untuk peningkatan kualitas kinerja penganggaran. Perhitungan nilai kinerja anggaran pada Tahun 2023 adalah gabungan dari nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) sebesar 60% serta nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) sebesar 40%. Nilai kinerja anggaran satuan kerja merupakan tolak ukur kualitas pelaksanaan anggaran.

Pemilihan judul dan penelitian ini sangat menarik perhatian penulis agar didapatkan hasil evaluasi yang komprehensif atas pelaksanaan pengelolaan APBN pada satker Balai Diklat Keagamaan Manado untuk Tahun Anggaran 2023. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan dan peningkatan kualitas pengelolaan APBN ke depannya. Dengan pengelolaan APBN yang semakin baik memberikan dampak juga pada peningkatan kualitas kinerja Balai Diklat Keagamaan Manado.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisa data yang ada. Tujuan penelitian kualitatif adalah pendalaman pemahaman serta mendeskripsikan data yang ada.

Penelitian yang dilakukan bersifat analitis deskriptif, dimana penelitian dilakukan berdasarkan realitas data serta keadaan dan kenyataan yang ada. Berdasarkan data – data yang ada maka dilakukan analisa data untuk membahas dan mendalami lebih lanjut serta memberikan rekomendasi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada.

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber data yang ada pada aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan yaitu SPANINT dan MONEV SMART serta studi literasi berdasarkan aturan – aturan yang berlaku. Data tersebut merupakan hasil penilaian pengelolaan keuangan yang dilakukan sepanjang Tahun 2023 mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan pencapaian kinerja atau output.

Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan studi pustaka atau studi literatur untuk mendapatkan referensi – referensi terkait pelaksanaan anggaran serta monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran. Selanjutnya dilakukan analisis dari data yang terkumpul dan pengamatan untuk mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai atas hasil analisis data tersebut.

Landasan Teori

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Monev SMART yang dibangun oleh Kementerian Keuangan merupakan suatu sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran terpadu yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Sistem monev tersebut merupakan implementasi atas PP Nomor 90 Tahun 2011 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga. Dalam pelaksanaannya, secara teknis aturan pelaksanaan monev SMART berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang telah mengalami beberapa kali perubahan aturan sampai dengan Tahun 2023. Pada Tahun 2023, pelaksanaan monev SMART berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran dititikberatkan pada alokasi belanja dan realisasinya serta pencapaian output dan outcome. Pada level satuan kerja, penilaian monitoring dan evaluasi kinerja anggaran berdasarkan pada empat aspek yaitu pencapaian keluaran atau output, konsistensi antara perencanaan dan realisasi serta penyerapan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran dengan detail pembahasan sebagai berikut :

1) Capaian Keluaran / Output

Aspek capaian keluaran dinilai dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian keluaran. Data target capaian diinput pada awal periode tahun anggaran sedangkan data realisasi berdasarkan pada pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI yang akan diteruskan secara otomatis pada aplikasi monev SMART. Pada saat satuan kerja mengisi data capaian keluaran berupa capaian output, rincian output (RO) dan klasifikasi rincian output (KRO), sistem akan menghitung secara otomatis nilai tingkat efisiensi dalam pencapaian output karena data nilai anggaran serta realisasi anggaran juga telah terbaca sistem pada monev SMART. Nilai maksimal yang dapat diinput pada capaian output adalah 100, sedangkan nilai maksimal capaian rincian output adalah 120. Perhitungan pengukuran aspek capaian keluaran adalah sebagai berikut :

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : capaian RO tingkat satuan kerja

RVRO_i : realisasi volume RO i

TVRO_i : target volume RO i

m : jumlah RO

2) Konsistensi implementasi terhadap perencanaan

Penilaian aspek konsistensi implementasi terhadap perencanaan berdasarkan pada perbandingan nilai realisasi penarikan dana setiap terhadap rencana penarikan dana (RPD). Nilai realisasi penarikan dana setiap bulan berdasarkan pada total nilai SP2D yang telah terbit dari aplikasi OM – SPAN akan secara otomatis bergulir ke aplikasi monev SMART. Sedangkan nilai RPD merupakan data yang berasal dari Halaman III DIPA yang dilakukan pemutakhiran setiap awal triwulan pada aplikasi SAKTI dan secara otomatis juga tersaji pada aplikasi monev SMART. Perhitungan nilai aspek konsistensi berdasarkan pada rumus berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAK_n : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n

RPDK_n : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n : jumlah bulan

3) Penyerapan Anggaran

Penilaian aspek penyerapan anggaran berdasarkan pada perbandingan nilai realisasi anggaran terhadap total pagu anggaran yang telah dialokasikan pada setiap satuan kerja. Data realisasi anggaran berasal dari total SP2D yang diterbitkan KPPN pada aplikasi OM – SPAN sedangkan data pagu anggaran berasal dari DIPA petikan satuan kerja. Data – data realisasi anggaran serta total pagu anggaran juga secara otomatis bergulir pada aplikasi monev SMART. Penilaian pengukuran aspek penyerapan anggaran berdasarkan rumus berikut :

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

4) Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penilaian aspek efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan pada total selisih antara pagu anggaran tiap keluaran dikalikan capaian keluaran terhadap realisasi anggaran tiap keluaran dibandingkan dengan total alokasi anggaran tiap keluaran.

Nilai aspek efisiensi yang tinggi dapat diperoleh jika volume capaian output besar disertai dengan sisa anggaran output yang tidak digunakan juga tinggi. Perhitungan nilai pengukuran aspek efisiensi berdasarkan pada rumus berikut :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Pada pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2023, masing – masing aspek memiliki pembobotan yang berbeda. Aspek pencapaian keluaran atau output memiliki porsi pembobotan paling besar yaitu sebesar 43,50%. Aspek konsistensi antara perencanaan dan realisasi memiliki bobot 18,20% dari total nilai evaluasi kinerja. Aspek penyerapan anggaran yang selama ini sering menjadi patokan kinerja anggaran satuan kerja justru memiliki porsi pembobotan paling kecil yaitu 9,70%. Sedangkan aspek efisiensi penggunaan anggaran memiliki porsi pembobotan yang cukup besar yaitu sebesar 26,80%.

Kementerian keuangan mengkategorikan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) menjadi 5 (lima) kelompok berdasarkan nilai EKA yang diperoleh satuan kerja pada akhir Tahun Anggaran. Kategori sangat baik jika nilai EKA lebih dari 90, kategori baik jika nilai EKA antara 80 dan 90, kategori cukup jika nilai EKA antara 60 dan 80, kategori kurang jika nilai EKA antara 50 dan 60 sedangkan kategori sangat kurang jika nilai EKA kurang dari atau sama dengan 50.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan sistem monev yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peraturan DirJen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 menyebutkan bahwa IKPA merupakan parameter pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Penilaian IKPA terdiri dari tiga aspek pengukuran yaitu kualitas perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan anggaran dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Kualitas Perencanaan Anggaran

Penilaian aspek kualitas perencanaan anggaran terdiri dari beberapa parameter penilaian yaitu revisi DIPA dan deviasi Halaman III DIPA dengan penjabaran sebagai berikut :

- Revisi DIPA

Parameter revisi DIPA menunjukkan kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja dengan bobot nilai 10% dari capaian nilai IKPA satuan kerja. Nilai kualitas perencanaan anggaran pada parameter revisi anggaran berdasarkan pada rata – rata rasio revisi DIPA tiap triwulan. Tidak seluruh revisi DIPA menjadi faktor perhitungan parameter ini, hanya revisi DIPA dengan kewenangan kanwil dengan pagu anggaran tetap di luar revisi administrasi seperti revisi untuk pemutakhiran Halaman III DIPA. Nilai parameter revisi DIPA dapat mencapai optimal jika total revisi per triwulan tidak lebih dari satu kali serta perhitungan jumlah revisi tidak bersifat kumulatif.

- Deviasi Halaman III DIPA

Parameter kualitas perencanaan anggaran juga dilihat dari besaran deviasi Halaman III DIPA dengan bobot nilai 10% dari capaian nilai IKPA satuan kerja. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan rata – rata rasio penyimpangan realisasi anggaran terhadap perencanaan pencairan anggaran tiap bulannya. Perencanaan anggaran yang tercantum pada Halaman II DIPA dapat dilakukan pemutakhiran data setiap triwulan dengan batas waktu revisi adalah sepuluh hari kerja pertama pada awal triwulan. Nilai perhitungan deviasi Halaman III DIPA merupakan nilai rata – rata deviasi dari Januari sampai dengan November dengan nilai maksimum deviasi adalah 100%. Nilai optimal untuk parameter ini dapat dicapai dengan melaksanakan pencairan anggaran sesuai dengan jadwal pencairan anggaran sehingga meminimalkan deviasi anggaran.

2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Penilaian aspek kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari beberapa parameter penilaian yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP serta dispensasi SPM dengan penjabaran sebagai berikut :

- Penyerapan Anggaran

Aspek pelaksanaan anggaran pada parameter penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator dengan bobot nilai cukup tinggi yaitu 20% dari capaian nilai IKPA satuan kerja. Penyerapan anggaran merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan kesesuaian realisasi belanja dengan target penyerapan anggaran tiap triwulan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pengukuran parameter ini berdasarkan pada rasio realisasi anggaran terhadap target penyerapan anggaran untuk masing – masing jenis belanja pada tiap triwulan.

- Belanja Kontraktual

Aspek pelaksanaan anggaran pada parameter belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai ketepatan waktu pendaftaran kontrak dengan bobot 40%, akselerasi kontrak dini (sebelum tahun anggaran) dengan bobot 30% serta akselerasi belanja modal dengan bobot 30%. Secara keseluruhan parameter belanja kontraktual memiliki bobot nilai 10% dari capaian nilai IKPA satuan kerja.

- Penyelesaian Tagihan

Penyelesaian tagihan sebagai salah satu parameter kualitas pelaksanaan anggaran dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian SPM LS kontraktual dengan bobot nilai 10% dari capaian nilai IKPA satuan kerja. Nilai parameter penyelesaian tagihan dapat mencapai optimal jika penyelesaian SPM LS kontraktual maksimal tujuh belas hari kerja dihitung dari tanggal BAST atau BASTHP sampai dengan SPM diterima oleh KPPN untuk proses konversi.

- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Kualitas pelaksanaan anggaran juga dipengaruhi oleh parameter pengelolaan UP dan TUP dengan bobot nilai 10% dari capaian nilai IKPA satuan kerja. Parameter ini mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban dengan bobot nilai 50% serta efisiensi pengelolaan UP dan TUP yang terdiri dari persentase GUP per bulan dengan bobot nilai 25% serta jumlah setoran sisa TUP dengan bobot nilai 25%.

- Dispensasi SPM (Surat Perintah Membayar)

Meskipun bobot penilaiannya paling kecil diantara parameter lainnya yaitu hanya 5% dari capaian nilai IKPA satuan kerja, dispensasi SPM juga berpengaruh pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran. Parameter ini digunakan untuk mengukur ketertiban satuan kerja dalam hal penyampaian SPM akhir tahun anggaran tidak melewati batas – batas tanggal yang telah ditetapkan.

3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran memiliki proporsi bobot nilai yang paling besar diantara seluruh parameter pendukung IKPA yaitu sebesar 25%. Perhitungan nilai aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan gabungan dari nilai kinerja pencapaian output dengan bobot nilai 70% serta ketepatan waktu pelaporan capaian output dengan bobot nilai 30%.

Kementerian keuangan mengategorikan nilai indikator kinerja pelaksanaan (IKPA) menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan nilai IKPA yang diperoleh satuan kerja pada akhir Tahun Anggaran. Kategori sangat baik jika nilai IKPA lebih dari 95, kategori baik jika nilai IKPA antara 89 dan 95, kategori cukup jika nilai IKPA antara 70 dan 89, serta kategori kurang jika nilai IKPA kurang dari 70.

Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah banyak dilakukan baik terkait evaluasi pada satuan kerja maupun faktor – faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pengelolaan keuangan maupun penelitian lainnya. Yayuk & Wildan (2023) dalam penelitian berjudul “*Analisa Reformulasi IKPA terhadap Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Kementerian Agama*” menyimpulkan bahwa IKPA sebagai instrumen yang tepat untuk digunakan dalam menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga utamanya sebagai indikator pengelolaan kinerja anggaran pada lingkup Kementerian Agama. Penelitian IKPA pada satuan kerja juga telah dilakukan oleh Elvina, Fahmi dan Rizqa (2023) pada Kejaksaan Tinggi Riau dengan judul “*Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pada Kejaksaan Tinggi Riau*”. Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa kinerja perencanaan anggaran, kinerja pelaksanaan anggaran, kinerja pertanggungjawaban, kinerja evaluasi anggaran serta kinerja akuntabilitas aparatur pemerintah pada satuan Kejaksaan Tinggi Riau dalam kategori baik.

Penelitian lain terkait penggunaan informasi kinerja pelaksanaan anggaran juga telah dilakukan oleh Agus & Rusdi (2021) dengan judul “*Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga*”, menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja satuan kerja secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor individu dalam penggunaan informasi kinerja, sistem pengukuran kinerja serta institusionalisasi pengukuran kinerja. Selain itu perilaku pegawai dalam pencapaian target kinerja juga dipengaruhi oleh adanya fenomena isomorfisma normatif dan koersif.

Pada penelitian lainnya, IKPA juga digunakan sebagai alat ukur kinerja dana tugas pembantuan. Berdasarkan penelitian dari Utomo (2022), disebutkan bahwa kinerja pengelolaan dana tugas pembantuan pada Provinsi Jambi berdasarkan data IKPA menunjukkan kinerja yang masih kurang baik.

Hasil dan Pembahasan

Alokasi anggaran Balai Diklat Keagamaan Manado pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 22.684.245.000 dengan pembagian alokasi belanja pada masing - masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
1	Belanja Pegawai (51)	7.172.176.000	31,62
2	Belanja Barang (52)	14.367.799.00	63,34
3	Belanja Modal (53)	1.144.270.000	50,4
Total		22.684.245.000	

Tabel 3. Alokasi Anggaran BDK Manado Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja Realisasi anggaran Tahun 2023 Satuan Kerja anggaran Balai Diklat Keagamaan Manado sebesar Rp. 22.643.102.122 (99,82%) dengan proporsi realisasi tiap jenis belanja adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	Belanja Pegawai	7.172.176.000	7.166.159.791	99,92	6.016.209
2	Belanja Barang	14.367.799.000	14.337.479.612	99,79	30.319.388
3	Belanja Modal	1.144.270.000	1.139.462.719	99,58	4.807.281
Total		22.684.245.000	22.643.102.122	99,82	41.142.878

Tabel 4. Realisasi Anggaran BDK Manado Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

Jika dilihat dari nilai realisasi anggaran BDK Manado Tahun 2023 sebesar 99,82% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran sangat baik karena telah mencapai target dari kementerian keuangan untuk realisasi anggaran yaitu sebesar 95%.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai Diklat Keagamaan Manado Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Aplikasi smart.kemenkeu.go.id mendapatkan nilai sebesar 87,69 (baik), dengan capaian masing masing indikator yaitu realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,82; konsistensi atas RPD 92,45; Capaian RO 100; Efisiensi 4,73; dan Nilai Efisiensi 61,83 sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Nilai Monev SMART Satker Balai Diklat Keagamaan Manado Tahun 2023

Dengan nilai EKA Tahun 2023 sebesar 87,69 masih belum mencapai target yang ditetapkan pusat yaitu 95 untuk nilai EKA. Berdasarkan Laporan Kinerja pada lingkup satuan kerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, nilai tersebut juga masih dibawah nilai rata – rata nasional yaitu 92,79.

Atas capaian nilai EKA tersebut terlihat bahwa masih ada nilai – nilai yang dapat dioptimalkan seperti nilai konsistensi atas RPD serta nilai efisiensi. Nilai konsistensi atas RPD dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta melakukan revisi Halaman III DIPA sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nilai efisiensi dapat ditingkatkan dengan peningkatan realisasi capaian output sehingga terlihat efisiensi anggaran yang digunakan.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Diklat Keagamaan Manado Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Aplikasi OM-SPAN mendapatkan nilai sebesar 93,54 (baik), dengan capaian nilai untuk masing aspek atau indikator adalah sebagai berikut :

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MANADO

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output		Nilai Total	Konversi Bobot
1	049	025	426205	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MANADO	Nilai	100.00	54.02	100.00	96.00	100.00	91.93	100.00	97.39	93.54	100%	93.54
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.40	20.00	9.60	10.00	9.19	5.00	24.35			
					Nilai Aspek	77.01		97.59				97.39				

Gambar 2. Nilai Monev IKPA Satker Balai Diklat Keagamaan Manado Tahun 2023

Atas capaian nilai tersebut, terdapat 4 komponen indikator yang sudah mencapai nilai sempurna yaitu indikator revisi anggaran, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan dan dispensasi SPM. Nilai – nilai indikator tersebut harus terus dipertahankan untuk menjaga nilai IKPA agar tetap baik. Nilai komponen indikator revisi DIPA sudah optimal dengan nilai 100 yang artinya revisi yang dilaksanakan Balai Diklat Keagamaan Manado telah mengikuti aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dimana batas revisi DIPA adalah satu kali untuk tiap triwulan.

Nilai komponen penyerapan anggaran sudah mencapai 100 yang berarti Balai Diklat Keagamaan Manado telah memenuhi target akhir tahun yang ditetapkan Kementerian Keuangan yaitu untuk belanja pegawai sebanyak 95% serta belanja barang dan belanja modal sebanyak 90%.

Nilai komponen penyelesaian tagihan mencapai nilai 100 yang berarti seluruh SPM kontraktual disampaikan tepat waktu yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal BAST atau BAPP.

Nilai komponen dispensasi SPM mendapatkan nilai 100 yang berarti tidak ada dispensasi SPM atau tidak ada SPM yang penyampaiannya melewati batas waktu yang telah ditentukan pada batas – batas waktu akhir tahun anggaran. Nilai komponen indikator yang belum optimal berjumlah 4 indikator yaitu deviasi halaman III DIPA, belanja kontraktual, pengelolaan UP dan TUP serta nilai capaian output. Nilai – nilai tersebut masih dapat dioptimalkan untuk mendapatkan nilai IKPA diatas 95 dengan kategori baik sekali.

Komponen indikator deviasi halaman III DIPA mendapat nilai 54,2. Hal itu sejalan dengan nilai komponen monev EKA pada indikator konsistensi RPD yang nilainya belum optimal. Untuk memperbaiki nilai deviasi halaman III DIPA dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan sehingga mengurangi selisih antara realisasi dengan perencanaan anggaran tiap bulannya. Komponen indikator belanja kontraktual mendapat nilai 96. Hal itu terjadi karena ada realisasi kontrak belanja modal (53) dengan nilai diatas 50 – 200 juta yang selesai pada triwulan 2 dan 3 sehingga menurunkan nilai akselerasi belanja 53. Untuk memperbaiki komponen nilai indikator belanja kontraktual dapat dilakukan dengan merencanakan paket pengadaan belanja modal (53) dengan nilai antara 50 - 200 Juta agar dapat terealisasi pada triwulan 1.

Komponen indikator pengelolaan UP dan TUP mendapat nilai 91,93 yang berarti masih belum optimal karena adanya pengembalian sisa TUP akhir tahun 2023 sehingga menurunkan nilai indikator pengelolaan UP dan TUP. Optimalisasi nilai komponen ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang tepat dalam pengajuan TUP sehingga tidak ada setoran atas kelebihan TUP serta peningkatan pengelolaan UP dengan meningkatkan intensitas GUP.

Komponen lain yang menyebabkan nilai IKPA belum optimal adalah nilai indikator capaian output. Dengan porsi bobot penilaian yang besar pada komponen capaian output yaitu 25% maka nilai ini sangat berpengaruh pada nilai akhir IKPA. Pada Tahun 2023, nilai komponen capaian output Balai Diklat Keagamaan Manado adalah 97,39. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masih ada capaian output yang belum mencapai target akhir tahun anggaran. Optimalisasi nilai capaian output dapat dilakukan dengan memperhatikan realisasi capaian output agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pembahasan atas analisa data tersebut sejalan dengan penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya bahwasanya evaluasi nilai kinerja anggaran masih efektif digunakan sebagai alat ukur penilaian kinerja pengelolaan anggaran. Sekjen Kementerian Agama dalam audiensi bersama Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa capaian kinerja Kementerian Agama menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan sektor agama dan pendidikan yang turut mendukung pencapaian pembangunan nasional (Madyansyah, 2024).

Dalam Siaran Pers Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan akan terus mengevaluasi implementasi indikator – indikator penyusun nilai kinerja

anggaran (NKA) baik evaluasi kinerja anggaran (EKA) maupun Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). NKA diharapkan dapat menjadi alat ukur dalam melihat dinamika dan spending behaviour pengelolaan anggaran pada Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, satuan kerja perlu terus meningkatkan capaian nilai kinerja anggaran yang juga digunakan sebagai instrumen atau alat dalam pemberian penghargaan dan insentif dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian / Lembaga.

Kesimpulan

Berdasarkan capaian nilai monev EKA dan IKPA maka Nilai Kinerja Anggaran satker Balai Diklat Keagamaan Manado adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} NKA &= (60\% \times EKA) + (40\% \times \text{nilai IKPA}) \\ &= (60\% \times 87,69) + (40\% \times 93,54) = 90,03 \end{aligned}$$

Nilai kinerja anggaran untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 90,03 masih bisa dikategorikan baik, tetapi akan lebih baik lagi jika dapat ditingkatkan karena masih dibawah nilai kinerja anggaran Kementerian Agama Tahun 2023 yaitu 95,20.

Rekomendasi

Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2023 menyebutkan bahwa komitmen seluruh pihak merupakan faktor penting dalam pencapaian realisasi anggaran dan nilai kinerja anggaran. Komitmen pimpinan memegang peranan penting dalam memantau capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta pengembangan dan penguatan aplikasi pelaporan pada lingkup internal Kementerian Agama. Faktor lain yang menjadi kunci sukses pencapaian nilai realisasi kinerja dan anggaran adalah adanya bimtek, pemantauan pelaporan, serta koordinasi antara satker pusat dan daerah.

Atas capaian nilai kinerja anggaran Balai Diklat Keagamaan Manado Tahun 2023, dapat dilakukan optimalisasi dengan beberapa langkah diantaranya melakukan perbaikan perencanaan sehingga dapat memperbaiki nilai komponen indikator konsistensi atas RPD pada monev EKA dan nilai komponen indikator deviasi halaman III DIPA pada monev IKPA, peningkatan pengelolaan UP dan TUP agar tidak ada setoran sisa TUP dan peningkatan intensitas GUP, meningkatkan perencanaan pengadaan agar proses pengadaan belanja modal dapat dimulai lebih awal dan diselesaikan pada triwulan 1, serta yang paling utama adalah pengendalian capaian output karena mempunyai bobot paling besar pada nilai IKPA yaitu 25% dengan cara meningkatkan pengendalian dan pemantauan capaian kinerja sehingga dapat mencapai target capaian output.

Daftar Pustaka

- Armista, Elvina; Fahmi Oemar dan Rizqa Anita. (2023). *Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pada Kejaksanaan Tinggi Riau*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan. Vol. 5 no. 2.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. (2024). *Laporan Kinerja Tahun 2023*. Jakarta
- Badan Diklat Keagamaan Manado Kementerian Agama. (2024). *Laporan Kinerja Tahun 2023*. Manado.
- DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. (2022). Per-5/PB/2022 Tentang *Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta.
- Hanafi, Imam dan Sartika Ayu Wulandari. (2023). *Pengelompokan Satuan Kerja Berdasarkan Performa Delapan Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Reformulasi Tahun 2022*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 8, No.2.
- Kakerissa, Herdian dkk. (2023). *Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No.2.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Siaran Pers Menkeu Berikan Penghargaan pada K/L dengan Kinerja Anggaran Terbaik dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2022*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Siaran Pers: Tutup Kas, Menkeu Apresiasi Jajarannya Mengelola Kas Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. Jakarta.
- Madyansyah, Muhammad Marjan. (2024). *Nilai Kinerja Anggaran Kemenag 2023 Naik, Sekjen : Keberhasilan Kemenag dalam Pembangunan Nasional*. <https://kemenag.go.id/nasional/nilai-kinerja-anggaran-kemenag-2023-naik-sekjen-keberhasilan-kemenag-dalam-pembangunan-nasional-nusIA>.
- Manangin, Sri Ika Novita; Jantje Tinangon dan Hendrik Gamaliel. (2023). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Pada Kppn Manado*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL” Vol. 14 No. 2.
- Putra, Yudha Perdana. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Anggaran Aspek Implementasi Pada Satuan Kerja Lingkup Bpkp Ri: Analisis Perbandingan*.
- Putri, Dina Arinda. (2022). *Mengenal IKPA, SMART, dan IKU PKPA*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15719/MENGENAL-IKPA-SMART-DAN-IKU-PKPA.html>.
- Rahayu, Yayuk Sri dan Wildan Ahmil Kautsar. (2023). *Analisa Reformulasi IKPA terhadap Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Kementerian Agama*. Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik Vol. 2 No. 1.

- Rozaki, Jordhi Mirza dan Bambang Suhartono. (2024). *Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran Pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022*. Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik Vol.6 No.1.
- Saleh, Rahmad dan Nina Andriana. (2021). *Efektivitas Dan Efisiensi Belanja Berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kpp Pratama Bulukumba*. Jurnal Info Artha Vol.5, No.2.
- Santosa, Agus Bayu dan Rusdi Akbar. (2021). *Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga*. ABIS: Accounting and Business Information System Journal Vol. 9 No. 4.
- Sodikin. (2021). *Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menggunakan IKPA*. Journal of Education, Administration, Training, and Religion Vol. 2 No. 2.
- Syahni, Nanda dan Muhammad Rizki. (2023). *Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Aspek Implementasi Pada Pusbindiklat LIPI Tahun 2019*. Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship Vol. 5 No. 1.
- Tjandra, W. R. (2009). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Utomo, Eko Setiyo. (2022). *Mengukur Kinerja Dana Tugas Pembantuan Dengan IKPA (Studi Kasus di Prov. Jambi)*. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Kemenkeu). Vol. 11 No. 04.
- Yuswanto. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Lampung: Justice Publisher.

